

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara dengan keragaman geografis dan kondisi wilayah yang kompleks, sehingga dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (Irawan et al., 2022). Letaknya yang berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dua samudra, yakni Pasifik dan Hindia, serta adanya karakteristik geologis, hidrologis, demografis, dan sosiologis yang beragam, menjadikan Indonesia rentan terhadap berbagai risiko bencana, baik bencana alam, non-alam, dan sosial (Yulianto et al., 2021). Oleh karena itu, sebagai upaya dalam menghadapi risiko tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan UU RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menegaskan bahwa salah satu tujuan penanggulangan bencana adalah menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat dari berbagai risiko kebencanaan dengan memastikan proses penanggulangan bencana dilaksanakan melalui koordinasi dan keterpaduan antar pemangku kepentingan, serta mendorong partisipasi antara pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta.

Meskipun kerangka hukum penanggulangan bencana di Indonesia telah disusun secara menyeluruh, pelaksanaannya masih dihadapkan pada beragam kendala. Hal tersebut dipengaruhi oleh posisi geografis Indonesia yang terletak di kawasan tropis dengan dua musim yang berlangsung secara bergantian, yaitu musim hujan dan musim kemarau, serta karakteristik geografis Indonesia yang

Didominasi oleh wilayah perairan, yakni sekitar 70 persen, sementara 30 persen sisanya berupa daratan, serta memiliki topografi yang beragam dari dataran rendah hingga pegunungan, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai bencana di berbagai daerah (Nandita et al., 2023). Oleh karena itu, berdasarkan kondisi tersebut Indonesia diklasifikasikan sebagai salah satu dari 35 negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia (Prasetyoningsih & Ichsan, 2024).

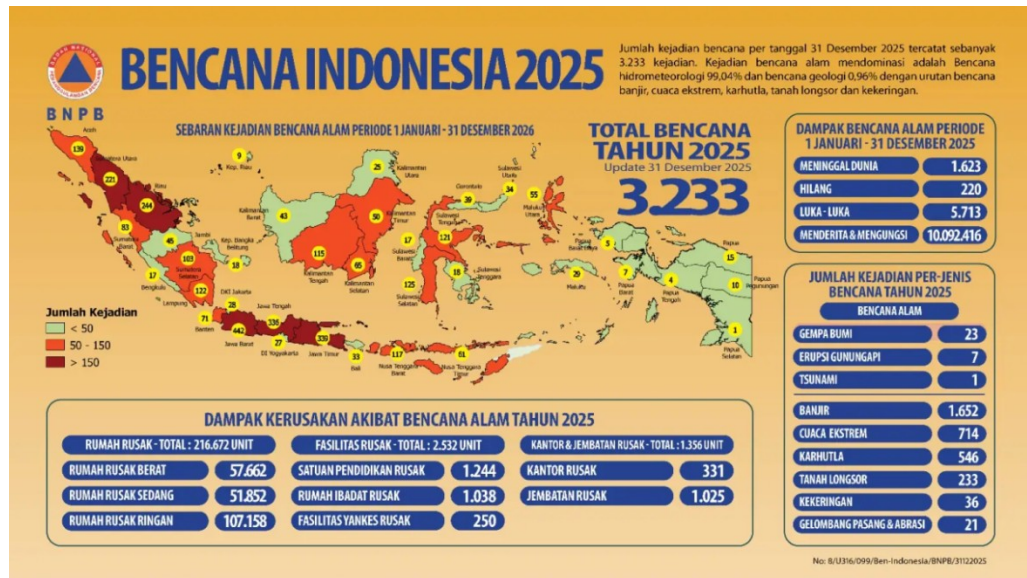
**Tabel 1.1 Sebaran Kejadian Bencana Alam Berdasarkan Jenis Bencana Alam di Indonesia Tahun 2022-2025**

| Jenis Bencana             | Tahun        |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
| Banjir                    | 1.531        | 1.255        | 1.420        | 1.652        |
| Kebakaran Hutan & Lahan   | 252          | 2.051        | 973          | 546          |
| Cuaca Ekstrem             | 1.068        | 1.261        | 733          | 714          |
| Tanah Longsor             | 634          | 591          | 207          | 233          |
| Kekeringan                | 4            | 174          | 89           | 36           |
| Gelombang pasang & Abrasi | 26           | 33           | 27           | 21           |
| Gempa Bumi                | 28           | 31           | 15           | 23           |
| Erupsi Gunung Berapi      | 1            | 4            | 8            | 7            |
| Tsunami                   | 0            | 0            | 0            | 1            |
| <b>Jumlah</b>             | <b>3.544</b> | <b>5.400</b> | <b>3.472</b> | <b>3.233</b> |

Sumber: BNPB, 2025. <https://www.bnpb.go.id/infografis> (data diolah penulis dan diakses pada 01 Januari 2026)

Berdasarkan data yang dirilis BNPB, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2022 hingga 2025 tercatat adanya perubahan jumlah kejadian bencana alam yang tidak stabil di Indonesia. Dalam empat tahun terakhir, bencana banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan menjadi jenis bencana yang paling sering terjadi. Di antara seluruh jenis bencana tersebut, banjir menempati posisi tertinggi secara nasional dengan 1.652 peristiwa dari total 3.233 kejadian bencana sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember 2025 (BNPB, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa banjir tercatat sebagai bencana yang paling sering

terjadi di Indonesia dalam empat tahun terakhir dengan jumlah kejadian yang konsisten melampaui seribu kasus setiap tahunnya.



**Gambar 1.1 Infografis Bencana Alam di Indonesia Tahun 2025**

Sumber: BNPB, 2025. <https://www.bnpb.go.id/infografis/infografis-bencana-tahun-2025> (diakses pada 01 Januari 2026).

Berdasarkan pada Infografis Bencana di Indonesia Tahun 2025, Provinsi Jawa Timur termasuk dalam zona merah dengan tingkat kejadian bencana yang tinggi, yaitu 339 kejadian hingga pertengahan 31 Desember 2025. Jumlah ini menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan kejadian bencana terbanyak kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Tingginya intensitas kejadian bencana tersebut berkaitan dengan karakteristik hidrologis wilayah Jawa Timur. Dimana Provinsi ini dilalui oleh tujuh Daerah Aliran Sungai (DAS) utama yang memiliki potensi banjir cukup besar, yaitu Sungai Brantas, Welang Rejoso, Madura, Bondoyudo Bedadung, Pekalen Sampean, Bengawan Solo, dan Baru Bajulmati. Dari tujuh DAS utama tersebut, Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo memiliki peran signifikan karena alirannya melintasi dan memengaruhi kondisi hidrologis Kota Surabaya. Selain itu, kondisi topografi Surabaya yang didominasi oleh dataran

rendah seluas 80,72 persen dengan ketinggian antara 3–6 meter di atas permukaan laut menjadikan Kota Surabaya rawan terhadap limpasan air dari sungai-sungai tersebut, terutama pada saat intensitas curah hujan tinggi (Syahtoni et al., 2024).

Selain dipengaruhi oleh karakteristik hidrologis tersebut, Kota Surabaya juga menghadapi tekanan tambahan yang berasal dari pesatnya laju urbanisasi dan perluasan kawasan terbangun berdampak pada berkurangnya kemampuan lahan dalam menyerap air hujan (Hendryarto et al., 2025). Oleh karena itu, permasalahan banjir di Kota Surabaya masih menjadi tantangan utama. Genangan tetap terjadi di sejumlah titik ketika curah hujan tinggi hingga melampaui kapasitas saluran drainase. Kondisi tersebut sejalan dengan pernyataan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam konferensi pers, yang mengatakan bahwa:

**Kompas.com** – "Saya masih punya sekitar 200 titik yang jadi tanggungan soal banjir, ini bukan titik banjir, tapi ini udah sumbernya. Ini kalau 200 titik, jadi sekitar 400 wilayah yang jadi sumbernya," kata Eri saat menyampaikan keterangan dalam konferensi pers di kawasan Raya Kupang Indah, Surabaya, pada Rabu (11/12/2024).

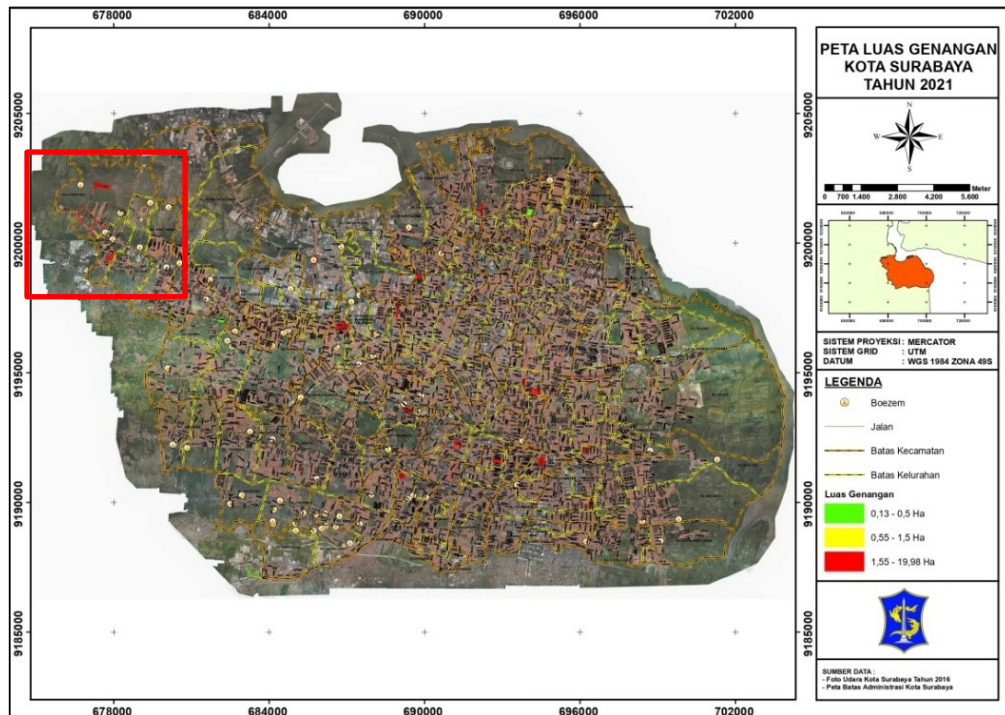
Sumber: <https://surabaya.kompas.com/read/2024/12/11/21250577> (diakses pada 19 Oktober 2025).

Berdasarkan pernyataan Pemerintah Kota Surabaya yang dikutip dari Kompas.com (2024), diketahui bahwa permasalahan banjir di Kota Surabaya tidak hanya disebabkan oleh genangan yang bersifat sementara, melainkan berakar pada keberadaan titik-titik pusat pemicu banjir yang tersebar di berbagai wilayah. Tercatat sekitar 200 titik pusat banjir yang berpotensi meluas menjadi kurang lebih 400 wilayah terdampak, kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih menghadapi keterbatasan dan tantangan dalam tata kelola sistem drainase dan infrastruktur pengendalian banjir di Kota Surabaya.

Berdasarkan pelaporan dari BPBD Kota Surabaya yang disampaikan melalui berbagai liputan media, kawasan Surabaya Barat merupakan salah satu wilayah di Kota Surabaya yang tergolong rawan bencana banjir dan genangan. Wilayah ini kerap mengalami genangan dengan ketinggian cukup signifikan ketika curah hujan turun deras, khususnya di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Pakal, Kecamatan Tambak Osowilangun, dan Kecamatan Benowo. Kondisi tersebut sejalan dengan pernyataan Kepala BPBD Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro, yang menyatakan bahwa:

**Detikjatim.com** – “Sebelum adanya laporan genangan yang masuk ke BPBD, di Surabaya Barat memang sudah hujan deras sejak sekitar pukul 14.00 hingga 18.00. Berdasar pada data BPBD Kota Surabaya hingga pukul 21.28, sejumlah wilayah dilaporkan mengalami genangan dengan ketinggian yang cukup parah, mencapai sekitar 40 cm. Tempatnya di sekitar Kelurahan Pakal, beberapa kawasan lainnya seperti Jalan Sepat Lidah Kulon RT 05 RW 05 serta Jalan Tengger Raya di wilayah Kandangan Benowo juga sempat mengalami genangan hingga 40 cm sebelum perlahan surut.”  
Sumber: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7198808> (diakses pada 27 Desember 2025)

Berdasarkan pernyataan tersebut, genangan banjir di kawasan Surabaya Barat terjadi di sejumlah titik dengan ketinggian yang bervariasi. Kondisi tersebut semakin jelas apabila dilihat dari Peta Luas Genangan Kota Surabaya berikut:



**Gambar 1.2 Peta Luas Genangan Kota Surabaya Tahun 2021**

Sumber: DSDABM Kota Surabaya, 2026

Berdasarkan Peta Luas Genangan Kota Surabaya, dapat dilihat bahwa wilayah genangan di Kota Surabaya ditunjukkan melalui warna hijau, kuning, dan merah yang menandakan perbedaan tingkat luas genangan, mulai dari skala kecil (0,13–0,5 Ha) hingga skala besar (1,55–19,98 Ha). Pada wilayah Surabaya Barat, tampak sejumlah titik genangan yang didominasi oleh warna merah, menunjukkan tingkat kerawanan genangan yang tinggi. Persebaran warna merah di wilayah Surabaya Barat terlihat pada area yang berada dekat dengan saluran primer serta kawasan permukiman yang berkembang pesat. Temuan tersebut diperkuat oleh data titik genangan banjir di wilayah Surabaya Barat pada tahun 2024 yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.2 Titik Genangan Banjir di Wilayah Kota Surabaya Barat Tahun 2024**

| No | Lokasi                     | Ketinggian Air     |
|----|----------------------------|--------------------|
| 1. | Jalan Pakal Barat          | $\pm 30$ cm        |
| 2. | Jalan Raya Beji            | $\pm 30$ – $40$ cm |
| 3. | Jalan Sepat Lidah Kulon    | $\pm 40$ cm        |
| 4. | Jalan Tengger Raya, Benowo | $\pm 40$ cm        |
| 5. | Jalan Pakal Madya Barat    | $\pm 70$ cm        |
| 6. | Pondok Benowo Indah        | $\pm 50$ cm        |
| 7. | Jalan Pakal Mulyo          | $\pm 15$ cm        |

Sumber: BPBD Kota Surabaya dalam Detikjatim.com, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-719880> (data diolah peneliti dan diakses pada 27 Desember 2025)

Pada Tabel 1.2 Titik Genangan Banjir di Wilayah Kota Surabaya Barat Tahun 2024, menunjukkan bahwa genangan di wilayah Surabaya Barat terjadi di berbagai titik dengan ketinggian air yang bervariasi, mulai dari  $\pm 15$  cm hingga mencapai  $\pm 70$  cm. Serta, jika ditinjau berdasarkan wilayah kecamatan, data pada Tabel 1.2 Titik Genangan Banjir di Wilayah Kota Surabaya Barat Tahun 2024, menunjukkan bahwa Kecamatan Pakal menjadi wilayah yang paling dominan mengalami genangan banjir, ditandai dengan jumlah titik genangan yang lebih banyak serta ketinggian air yang relatif lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya di Surabaya Barat.

Kondisi tersebut sejalan dengan temuan penelitian Syahtoni et al. (2024) yang menyatakan bahwa wilayah Surabaya Barat, meliputi Kecamatan Pakal, Kecamatan Benowo, dan Kecamatan Sambikerep merupakan salah satu wilayah di Kota Surabaya yang tergolong rawan bencana banjir dan genangan. Kondisi tersebut juga sejalan dengan karakteristik hidrologis Surabaya Barat yang menerima limpasan air dari Kabupaten Gresik saat hujan deras, sehingga

meningkatkan tekanan terhadap sistem drainase yang ada. Selain itu, Kecamatan Pakal memiliki topografi yang relatif datar, sehingga dalam beberapa tahun terakhir sejumlah titik di wilayah ini dilaporkan mengalami genangan dengan durasi yang bervariasi, terutama pada area yang berada dekat dengan saluran primer. Kondisi tersebut juga sejalan dengan pernyataan Pemerintah Kota Surabaya melalui pernyataan Wali Kota Eri Cahyadi dalam konferensi pers, yang mengatakan bahwa:

**Radarsurabaya.id** - “Kalau di Kabupaten Gresik hujannya deras, di Jalan Pakal pasti langsung banjir. Menurut warga juga, pernah sekitar pukul satu siang tidak hujan tapi tetap banjir karena ada air kiriman dari Gresik, yang di Benowo juga itu kena,” ujar Cak Eri saat meninjau lokasi di Balai RW 3 Kelurahan Pakal, Surabaya. Ia menambahkan bahwa warga mengeluhkan banjir di Pakal yang sudah terjadi lebih dari sepuluh tahun lamanya.”

Sumber: <https://radarsurabaya.jawapos.com/surabaya/774176129> (diakses pada 31 Oktober 2025)

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Kota Surabaya membangun infrastruktur pengendalian banjir melalui pembangunan rumah pompa dan bozem yang dikelola oleh DSDABM Kota Surabaya. Menurut Makmun et al. (2025), secara teknis rumah pompa berfungsi mempercepat proses pengaliran air dari kawasan rawan genangan ke saluran primer atau sungai, terutama ketika volume air hujan yang masuk melebihi kapasitas saluran drainase. Sementara itu, bozem berfungsi sebagai kolam retensi yang menampung limpasan air hujan sementara sebelum dialirkan (dengan pompa) ke saluran pembuangan saluran primer atau sungai (Widianto & Wibisono, 2025). Hal tersebut menjadikan rumah pompa dan bozem sebagai komponen krusial dalam sistem pengendalian banjir, karena melalui mekanisme pemompaan, rumah pompa dapat

mengeluarkan air secara lebih cepat dari wilayah rawan banjir sehingga mampu menekan dampak genangan yang terjadi.

Pelaksanaan pembangunan rumah pompa dan bozem juga berlandaskan pada regulasi nasional, yaitu Permen PU No. 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, yang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan sistem drainase yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan, termasuk pembangunan kolam retensi dan rumah pompa (Kementerian Pekerjaan Umum, 2014). Pada tingkat daerah, kebijakan ini diperkuat melalui Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2025 tentang RTRW Kota Surabaya Tahun 2025–2045, yang mengamanatkan pengembangan sistem drainase dan mitigasi risiko banjir sebagai bagian dari pengelolaan tata ruang perkotaan. Selain itu, Perwali Kota Surabaya No. 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menegaskan pentingnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terkoordinasi, termasuk aspek koordinasi antarinstansi, pelaporan, penyesuaian aturan bantuan atau sumbangan, serta pengelolaan infrastruktur mitigasi banjir.

Dengan berlandaskan beberapa regulasi tersebut, DSDABM Kota Surabaya tidak hanya bertanggung jawab atas penyediaan infrastruktur, tetapi juga melaksanakan perencanaan program, koordinasi antar unit, dan pengelolaan operasional di lapangan. Dengan demikian, efektivitas program mitigasi banjir sangat bergantung pada kinerja organisasi yang terstruktur dan sistematis. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cahyaningrum et al., (2024), Pemerintah Kota Surabaya melalui DSDABM Kota Surabaya mengalokasikan anggaran khusus

sebesar Rp776 miliar untuk penanganan banjir pada tahun 2024. Alokasi anggaran tercantum dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021–2026 melalui agenda “Surabaya Maju Hijau Tertata”, yang menekankan pengelolaan ruang terbuka hijau, normalisasi sungai, serta penyediaan infrastruktur yang ramah lingkungan (Buchori & Nuryanto, 2025).

Hal tersebut menyatakan bahwa, infrastruktur pengendalian banjir adalah infrastruktur bernilai tinggi. Maka dari itu, DSDABM Kota Surabaya harus meningkatkan transparansi pelaksanaan proyek dengan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran serta perkembangan pembangunan secara berkala. Namun, efektivitas tata kelola pembangunan infrastruktur pengendalian banjir tidak dapat diukur hanya dari keterbukaan informasi semata. Menurut UNDP (1997) dalam Saputra & Wardhana (2025), tata kelola yang baik juga mencakup akuntabilitas kinerja, efektivitas operasional, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya laporan masyarakat mengenai munculnya genangan berulang pada musim hujan yang disebabkan oleh penyumbatan sampah. Berdasarkan hasil observasi awal di DSDABM Kota Surabaya, peneliti melakukan wawancara pendahuluan dengan Bapak Dimas Mahardhika Akbar, selaku Staf Bidang Drainase. Dalam wawancara tersebut, beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau masalah keluhan warga itu hampir sama semua. Biasanya karena genangan yang muncul di setiap musim hujan. Setelah kita periksa, ternyata ada sumbatan sampah organik (daun) maupun non-organik (plastik dari bungkus makanan dan lain lain) di saluran (selokan air). Terus waktu ditanya kapan terakhir kerja bakti, pasti dijawab sudah lama sekali”. (Hasil wawancara pendahuluan, 7 Oktober 2025).

Permasalahan tersebut juga tercermin dalam sejumlah kejadian yang diberitakan media. Salah satunya dilaporkan oleh Detik Jatim (2025) yang mencatat bahwa petugas rumah pompa harus membersihkan sampah hingga mencapai 35 ton per hari, bahkan di luar musim hujan. Temuan tersebut diperkuat oleh pernyataan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang menegaskan bahwa masyarakat masih kerap membuang barang ke sungai sehingga menghambat kinerja rumah pompa dan meningkatkan risiko kerusakan peralatan. Beliau menyatakan:

**Detikjatim.com** - "Buang-buang barang, rumah pompa ini harganya mahal, diperuntukkan untuk semua warga supaya tidak terjadi banjir. Kalau sudah begini, *mechanical screen* jebol, pompanya juga jebol." jelasnya. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa saat melakukan inspeksi mendadak di Rumah Pompa Kalisari, ditemukan dua mesin pompa air dalam kondisi rusak. Kerusakan tersebut diketahui disebabkan oleh kursi kayu yang terbawa aliran sungai akibat dibuang oleh warga. Ia menjelaskan bahwa pada awal musim hujan, sampah yang selama ini mengendap di sungai akan terbawa arus dan menumpuk, sehingga petugas harus bekerja lebih keras untuk menyaring sampah di rumah pompa agar tidak menghambat aliran air dan memicu banjir. "Sampahnya itu sudah tidak habis-habis, jumlahnya sangat banyak. Ini terjadi karena kita, masih membuang sampah ke sungai," ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa setiap hari, tidak hanya saat hujan, petugas membersihkan sampah mencapai sekitar 35 ton di seluruh rumah pompa."

Sumber: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8186589> (Diakses pada 02 November 2025)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan banjir di Kota Surabaya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam, tetapi juga oleh perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Akibatnya, efektivitas sistem pengendalian banjir menjadi menurun sehingga potensi terjadinya genangan dan banjir semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian banjir tidak cukup ditentukan oleh keberadaan rumah pompa dan

bozem sebagai infrastruktur fisik, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan dan operasional di lapangan serta dukungan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan fungsinya. Sehingga, edukasi dalam menjaga kebersihan saluran drainase menjadi menjadi aspek penting dalam meningkatkan kesadaran warga terhadap upaya pencegahan banjir dan genangan. Maka dari itu, keberhasilan mitigasi banjir sangat ditentukan oleh bagaimana suatu program direncanakan, diimplementasikan, dan dikelola secara berkelanjutan oleh institusi terkait bersama masyarakat (Denisya & Hertati, 2024).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan banjir di wilayah Surabaya Barat, khususnya di Kecamatan Pakal, masih menjadi tantangan yang kompleks meskipun Pemerintah Kota Surabaya melalui DSDABM telah membangun berbagai infrastruktur pengendalian banjir, seperti rumah pompa dan bozem. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa genangan tetap terjadi akibat keterbatasan kapasitas saluran, kerusakan peralatan, dan penyumbatan sampah yang menghambat kinerja rumah pompa. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa kapasitas drainase dan bozem di kawasan Surabaya Barat belum sepenuhnya optimal dalam menampung limpasan air hujan dengan intensitas tinggi (Widianto & Wibisono, 2025). Dengan demikian, permasalahan banjir tidak hanya terkait dengan aspek teknis atau infrastruktur fisik, tetapi juga terkait dengan efektivitas tata kelola program pengendalian banjir, termasuk perencanaan, koordinasi, operasional, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut lebih lanjut melalui penelitian yang

berjudul “Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Rumah Pompa dan Bozem dalam Upaya Mitigasi Banjir di Kecamatan Pakal oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada penulisan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yaitu "Bagaimana Efektivitas Tata Kelola Program Pembangunan Rumah Pompa dan Bozem dalam Upaya Mitigasi Banjir di Kecamatan Pakal oleh DSDABM Kota Surabaya?"

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada penulisan rumusan masalah serta untuk memperjelas fokus permasalahan yang diteliti, maka perlu ditentukan tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, dan mendeskripsikan Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Rumah Pompa dan Bozem dalam Upaya Mitigasi Banjir di Kecamatan Pakal oleh DSDABM Kota Surabaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Sebuah penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi tidak hanya bagi peneliti, tetapi juga bagi berbagai pihak lainnya, baik yang merasakan dampak secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

### **a. Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai tata kelola pemerintah daerah yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur mitigasi banjir di wilayah perkotaan, sehingga dapat dikaji

dan dipelajari secara lebih mendalam untuk memahami permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi para akademisi dalam melakukan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas tata kelola pengendalian banjir.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai penerapan konsep tata kelola dalam konteks penanggulangan banjir melalui pembangunan infrastruktur drainase perkotaan.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti untuk mengembangkan pengetahuan, pengalaman penelitian, serta keterampilan dalam penyusunan karya tulis ilmiah, serta sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Prodi Administrasi Publik, UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi DSDABM Kota Surabaya dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pembangunan rumah pompa dan bozem sebagai upaya mitigasi banjir, serta dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan program di masa yang akan datang.
3. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung keberlanjutan fungsi rumah pompa dan bozem sebagai sarana mitigasi banjir di lingkungan sekitar.